



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JUMIYATI ZAEN**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **489279**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.241.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 663 m2/192 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 805.000.000
2. Tanah Seluas 206 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 173 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah Seluas 192 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 106.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **379.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA TGN40R-GKMDKD Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA L 1K02Q33L1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. MOBIL, HONDA HR-V RU1 1.5 S MT CKD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 94.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **51.650.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	65.744.396
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.737.394.396
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.737.394.396

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.